



Pemulihan Kegiatan Pariwisata pada Masa Pandemi di Desa Wisata Banyubiru, Kabupaten Magelang melalui Pendampingan Bumdes Nirmala Biru

Nur Widiyanto¹, Tri Suyud Nusanto*¹

¹Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM),
Yogyakarta – Indonesia

Article Information

Submitted August 12, 2022

Revised August 14, 2022

Accepted August 17, 2022

Published August 17, 2022

Abstract

Tourism is considered the expected sector to recover the economic growth during the outbreak of Pandemic Covid-19, including for the village government. It brings the effort of the village government to maximize the role of Bumdes and Pokdarwis as central actors of tourism at the village level to recover tourism-based economic sectors, including in Banyubiru Tourism Village, Dukun Subdistrict, Magelang. After two years of the pandemic, the village government plans to re-start tourism activity by relying on the role of Bumdes and Pokdarwis in early 2022. However, this plan has been challenged by various obstacles; limited integration between stakeholders in tourism management and unclear work mechanisms between Bumdes Nirmala Biru and Pokdarwis Tirta Biru. The last problem is a budgeting issue connected to the regulation from the central government to allocate more than 40% of the village budget for the community's social-economic safety. These challenges are influencing the performance of Bumdes to achieve several targeted tourism goals. Based on these preliminary findings, the community services program has been carried out through several activities; observation, discussions, and facilitating the community action planning to develop a detailed 2022's work plan and business plan for Bumdes Nirmala Biru and Pokdarwis Tirta Biru.

Keywords: Tourism; Village Government; Bumdes; Work Plan, Governance

Pariwisata diharapkan menjadi pemicu pemulihan ekonomi di masa pandemic, termasuk bagi desa. Ini mendorong pemerintah desa untuk memaksimalkan peran Bumdes sebagai aktor utama pariwisata, termasuk di Desa Wisata Banyubiru, Kabupaten Magelang. Setelah dua tahun vakum, kegiatan pariwisata mulai dibuka dengan mengandalkan peran Bumdes dan Pokdarwis. Sayangnya, rencana tersebut menghadapi kendala; tidak ada tata kelola dan rencana kerja yang jelas. Masalah lain adalah anggaran dana desa untuk pariwisata tidak ada karena adanya ketentuan dari pemerintah pusat bahwa sekitar 48 % Anggaran Dana Desa harus digunakan untuk BLT dan penanganan Covid-19, sehingga beberapa kendala tersebut mempengaruhi kinerja Bumdes dan Pokdarwis. Berdasarkan temuan awal di atas, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wisata Banyubiru bertujuan mendampingi Bumdes Nirmala Biru untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan, menyusun rencana kerja dan memonitor implementasinya melalui serangkaian kegiatan; pengamatan terlibat, diskusi, wawancara hingga Focus Group Discussion. Setelah proses pendamping intensif selama sekitar 6 bulan, Bumdes Nirmala Biru berhasil me-reorganisasi kepengurusan dengan tata kelola lebih baik, memiliki program kerja lebih jelas serta menjalankan kembali beberapa agenda wisata dengan lebih inovatif, termasuk memiliki jaringan kemitraan lebih luas.

Kata Kunci: Pariwisata; Pemerintah Desa; Bumdes; Rencana Kerja; Tata Kelola

***Korespondensi Penulis:** Nur Widiyanto, nurwidiyanto@stipram.ac.id, STIPRAM Jl. Ahmad Yani Jl. Ringroad Timur No.52, Pelem Mulong, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

Copyright © 2022 Nur Widiyanto, Tri Suyud Nusanto

Pendahuluan

Kabupaten Magelang di Jawa Tengah didominasi oleh sektor agraris sehingga dituntut untuk mampu menemukan strategi pembangunan daerah tanpa meninggalkan tradisi agraris yang menjadi dasar tumbuhnya berbagai kegiatan budaya. Merujuk pada data resmi, penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Magelang adalah untuk kegiatan pertanian, yaitu mencapai angka 79,37% (RKPD Kabupaten Magelang, 2020). Budaya agraris ini menjadi sumber bagi berbagai kegiatan seni dan budaya yang dibangun secara mandiri oleh berbagai komunitas tumbuh dengan subur seiring dengan terjaganya budaya agraris. Hal ini, salah satunya terlihat dalam Festival Lima Gunung maupun Festival Lembah Merapi di Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun.

Banyaknya sumberdaya budaya ini menjadi sumberdaya penting bagi strategi poembangunan karena budaya adalah tulang punggung dari sektor pariwisata. Bagi kabupaten ini, sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling diandalkan mengingat Candi Borobudur disini. Lebih dari itu, kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta destinasi wisata super prioritas menjadi peluang besar untuk diintegrasikan dengan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Magelang, terutama di daerah KSPN Borobudur maupun area penyangga di sekitarnya. Rencana jalan tol yang melewati dapat membawa dua negative maupun positif sekaligus, tergantung dari pilihan strategi pembangunan yang tepat, salah satunya dengan mengintegrasikan pengembangan sektor pariwisata dalam rencana pembangunan di tingkat desa.

Perpaduan antara sektor pariwisata dalam pembangunan Kabupaten Magelang bisa dikembangkan dengan dua pendekatan sekaligus; *bottom up* dan *top down*. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dari berbagai rencana pengembangan wisata perdesaan (*rural tourism*) yang telah diinisiasi oleh kelompok masyarakat bersama pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Magelang 2014-2034 dengan target; “Terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai kabupaten wisata yang berdaya saing dan berwawasan budaya”. Mimpi besar ini telah dimulai dengan ditetapkannya 59 Desa Wisata hingga tahun 2021. Pengembangan wisata budaya sebagai bagian dari wisata perdesaan sendiri pada titik tertentu tidak hanya muncul dasar atas motif ekonomi. Studi Widiyanto dan Agra (2019) di Sabah, Malaysia menunjukkan bahwa selain untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dari pariwisata, keterlibatan Masyarakat Dusun di kaki Gunung Kinabalu dalam kegiatan ekowisata termasuk pendakian gunung juga digunakan untuk menguatkan identitas budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan kondisi geografis yang beragam, rencana pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Magelang telah dibagi menjadi empat (4) kluster; Kawasan Manunggal Jaya (Kecamatan Borobudur), Kawasan Eduwisata (Kecamatan Ngablak), Kawasan Merapi Edupark (Kecamatan Dukun) dan Kawasan Agrowisata di Kecamatan Ngluwar (Balitbangda Kab Magelang, 2021). Ke-empat kluster ini memiliki orientasi pengembangan pariwisata masing-masing, sekaligus menunjukkan bahwa proyeksi pengembangan kawasan perdesaan selaras

dengan pengembangan pariwisata, yang diharapkan bisa menjadi kunci penggerak bagi pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang merebak mulai medio 2020 menjadi game changer bagi kegiatan pariwisata secara global, termasuk di Desa Wisata Banyubiru. Meski pelaku pariwisata juga beradaptasi dengan situasi ini seperti yang terjadi di Kawasan Dieng (Afriana & Widiyanto, 2021), kebijakan pembatasan mobilitas menjadi upaya paling populer untuk mengurangi penyebaran virus tidak selaras dengan karakter utama kegiatan pariwisata yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Di tingkat asial, penurunan kunjungan wisatawan asing antara sebelum dan saat pandemic mencapai angka sekitar 62 %, dan diperkirakan angka yang sama juga berlaku untuk tingkat kunjungan wisatawan domestik.

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia 2017-2021

Tahun	Wisatawan Mancanegara
2017	14 039 799
2018	15 810 305
2019	14 915 610
2020	4 052 923
2021	1 557 530

Sumber; Biro Pusat Statistik, 2021

Kondisi yang sama juga dialami oleh Desa Wisata Banyubiru. Supriyadi, Ketua Pokdarwis Tirta Biru Desa Banyubiru menyatakan bahwa kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, penyekatan antar daerah serta penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat kegiatan wisata di Kabupaten Magelang, termasuk Pasar Tradisi Lembah Merapi di Desa Banyubiru tutup total sejak pertengahan 2020 hingga

akhir tahun 2021. Denok, salah pedagang pasar tradisi menyatakan selama kegiatan wisata tutup maka dia sepenuhnya kembali ke pekerjaan awal yaitu mengelola sawah dan kebun sebagai petani. Pelaku wisata di Desa Banyubiru memang diuntungkan dengan tingkat ketergantungan yang relatif rendah terhadap ekonomi pariwisata karena pasar tradisi hanya buka satu minggu sekali, sehingga mereka masih memiliki pekerjaan yang lain seperti bertani atau menjadi pedagang di pasar kecamatan.

Sekitar dua tahun pandemic berlangsung, program vaksinasi yang massif serta kondisi Kabupaten Magelang di PPKM Level II mendorong pengelola Desa Wisata Banyubiru memutuskan untuk membuka kembali kegiatan Pasar Tradisi Lembah Merapi pada bulan Januari 2022. Setelah vakum hampir dua tahun, kemandekan bagi organisasi pengelola wisata, baik Bumdes Nirmala Biru maupun Pokdarwis Tirta Biru seperti tidak terhindarkan, sehingga pengelolaan kegiatan wisata dimulai dari awal kembali. Dari sisi infrastruktur, kondisi lapak pedagang di pasar tradisi juga sudah rusak, sehingga perlu perbaikan total. Disinilah permasalahan dari upaya menghidupkan kembali kegiatan wisata di Desa Banyubiru muncul aspek tata kelola serta kelembagaan, dukungan anggaran maupun sinergitas dengan obyek wisata lain di sekitar hingga kondisi pandemi yang belum benar-benar berakhir. Berdasarkan kondisi factual diatas, kegiatan Pendampingan Bumdes Nirmala Biru, Desa Banyubiru, Kabupaten Magelang ini difokuskan kepada beberapa aspek;

1. Re-organisasi Bumdes Nirmala Biru dan unit usaha yang dikelola
2. Penyusunan Program Kerja Partisipatif Tahun 2022

3. Pengembangan Inovasi Usaha Pariwisata
4. Penguatan Jaringan Kerja/*Networking* Bumdes Nirmala Biru dan Pokdarwis Tirta Biru

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat di ini dilakukan selama 6 bulan dengan tahapan sebagai berikut;

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi & Studi Penjajagan						
2	Pelatihan						
3	Pendampingan Kelembagaan						
4	Monitoring Implementasi Program						
5	Penguatan Jaringan & Kemitraan						
6	Evaluasi dan Pelaporan						

Metode pertama adalah *pre-liminary study* (studi penjajagan) dengan melakukan pengamatan terlibat, yaitu memadukan antara observasi dan interview. Diawali dengan sosialisasi kepada Pemerintah Desa Banyubiru, Bumdes Nirmala Biru, Pokdarwis Tirta Biru dan masyarakat biasa yang dilanjutkan dengan serangkaian pengamatan dan interview untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang ada terkait pengelolaan pariwisata di Desa Banyubiru pada masa pandemi.

Metode kedua adalah dengan diskusi kelompok terbatas (*Focus Group Discussion*) bersama pengurus Bumdes Nirmala Biru, Pokdarwis Tirta Biru, Pemerintah Desa Banyubiru serta pedagang Pasar Tradisi Lembah Merapi untuk re-organisasi dan

menyusun program kerja Bumdes tahun 2022-2023.

Metode dan tahapan ketiga adalah monitoring dan evaluasi untuk memastikan beberapa program kerja jangka pendek berisi inovasi baru pengelolaan Pasar Tradisi Lembah Merapi sebagai ikon dari wisata di Desa Banyubiru. Kegiatan monitoring dilakukan hampir setiap Minggu pagi di Bukit Gununggono sebagai tempat Pasar Tradisi Lembah Merapi digelar bersama pengurus Bumdes dan Pokdarwis setempat.

Metode sekaligus tahapan keempat adalah *networking* atau penguatan jaringan bagi Bumdes Nirmala Biru, Pokdarwis Tirta Biru maupun kegiatan Pasar Tradisi Lembah Merapi. Penguatan jaringan ini dilakukan mulai dengan beberapa pengelola kegiatan non-pariwisata seperti seni dan olahraga di sekitar Desa Banyubiru, hingga ke insitusi tingkat provinsi yaitu DPRD Jawa Tengah untuk mendukung penguatan Pasar Tradisi Lembah Merapi sebagai ikon wisata di daerah penyangga Kawasan Pariwisata Superprioritas Nasional Borobudur dan area Gunung Merapi-Merbabu.

Hasil dan Pembahasan

Banyubiru adalah sebuah desa di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang yang terletak di antara Kawasan Candi Borobudur dan salah satu gunungapi paling aktif di dunia, Merapi. Desa ini merupakan “permata terpendam” di antara kedua area tersebut dan terbagi menjadi 14 dusun, dengan penduduk sebanyak 5.218 jiwa (Data Desa, 2022). Sebagian besar penduduk Desa Banyubiru adalah petani, paralel dengan penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan pertanian dengan berbagai jenis komoditas

sayuran, padi serta perikanan darat. Dari sisi geografis Desa Banyubiru memang cukup potensial untuk menjadi "hub" atau daerah penghubung antara Kawasan Borobudur dengan berbagai daya tarik wisata yang telah atau menunggu untuk dikembangkan di area sekitar Gunung Merapi dan Merbabu.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama sekitar 6 bulan dari Februari hingga Agustus 2022. Selain tim pengabdian dari STIPRAM sendiri, pelaksanaan pengabdian juga menghadirkan Bapak Ferry Wawan Cahayono M, Si selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan motivasi kepada pengurus Bumdes Nirmala Biru dan Pokdarwis Tirta Biru dalam rangka pemulihan ekonomi pariwisata di Desa Wisata Banyubiru.

Seperti yang sudah dibahas dalam bagian sebelumnya, setelah hampir dua tahun vakum akibat merebaknya Pandemi Covid-19 terjadi pergantian beberapa posisi dalam struktur kepengurusan Bumdes Nirmala Biru maupun Pokdarwis Tirta Biru di tahun 2021. Sayangnya, pergantian ini tidak diikuti oleh transformasi sistem keorganisasian dari periode kepengurusan sebelumnya. Baik Bumdes Nirmala Biru maupun Pokdarwis Tirta Biru mengalami pergantian pucuk pimpinan, namun tidak ada kontinuitas yang jelas tentang mekanisme pengelolaan organisasi, aset pasti yang dikelola serta distribusi tugas dan wewenang yang cukup jelas antara lembaga dalam pengelolaan kegiatan wisata di Desa Banyubiru, khususnya Pasar Tradisi Lembah Merapi di Bukit Gununggono. Eni, salah satu pengurus Bumdes Nirmala Biru menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan aset apa saja yang bisa dikelola oleh Bumdes Nirmala Biru dalam bentuk dokumen pelimpahan/

serah terima aset. Tanpa dukungan dokumen resmi pelimpahan aset mana saja yang diserahkan-kelolakan kepada Bumdes, maka ada kekhawatiran akan melampaui kewenangan yang diberikan.



Gambar 1. FGD di Aula Kantor Desa

Terkait dengan kondisi tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo memfasilitasi *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh Pengurus Bumdes Nirmala Biru, Pokdarwis Tirta Biru dan pedagang Pasar Tradisi Lembah Merapi untuk merumuskan struktur organisasi Bumdes dan Pokdarwis serta program kerja tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Banyubiru pada 13 Maret 2022. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa Bumdes Nirmala Biru sebagai pengelola kegiatan wisata di Desa Banyubiru yang memiliki tiga (3) unit usaha; (1) Penyewaan alat berupa molen, becak dan motor trail wisata, (2) unit usaha pertanian dan (3) unit usaha pariwisata yang dikelola oleh Pokdarwis Tirta Biru serta bertanggung jawab kepada pemerintah desa.

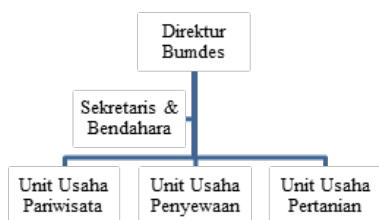
Selain program kerja, Disini, disepakati Pokdarwis Tirta Biru merupakan kepanjangan tangan Bumdes Nirmala Biru Desa Banyubiru yang mengelola kegiatan wisata, terutama Pasar Tradisi Lembah Merapi di Bukit Gununggono yang sudah berjalan sejak awal 2019. Dalam FGD tersebut juga dirumuskan program kerja Bumdes Nirmala Biru untuk

periode 2022-2023 yang menjadi acuan bagi tim pengabdian untuk melakukan proses monitoring serta evaluasi.

dari jam 06.00-12.00. Untuk itu, seperti yang direncanakan sebelumnya pada bulan Mei 2022 dibuka Café Lembah Merapi di area

Tabel 2. Program Kerja Bumdes 2022-2023

No	Program Kerja	Sumber Dana	Output
1.	Perbaikan tata kelola organisasi	Kas Bumdes	1.Rapat Rutin 2. Program Kerja
2.	Pengembangan Bukit Gununggono sebagai daya tarik wisata harian	1. Kas Bumdes 2. Penyertaan Modal Dana Desa 3. Pihak ketiga	1. Penataan area parkir wisata 2. Pembukaan Kafe Lembah Merapi 3. Pengembangan Peta Potensi Wisata Desa 4. Kerjasama event seni/olahraga di Pasar Tradisi Lembah Merapi
3	Penguatan Digital Marketing	Kas Bumdes	1. Website 2. Akun sosial media
4	Penguatan Kemitraan	Kas Bumdes	Memiliki 4 mitra baru.



Bagan 1. Struktur Bumdes Nirmala Biru

Kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya adalah monitoring pelaksanaan program kerja yang sudah dirumuskan, termasuk evaluasi bila ada kendala sekaligus penguatan jaringan mulai dari April hingga Agustus 2022. Hasil evaluasi bersama kegiatan Pasar Tradisi Lembah Merapi pada periode Maret-April menunjukkan bahwa perlunya daya tarik tambahan untuk mendatangkan pengunjung ke Pasar Tradisi Lembah Merapi dimana ada 37 lapak makanan tradisional yang digelar setiap Minggu pagi

pasar tradisi bagi penyuka kopi.



Gambar 2. Café Lembah Merapi di Pasar Tradisi Gununggono(Dokumentasi Pribadi).

Keberadaan café baru yang menyediakan berbagai varian menu Kopi Robusta dan Arabika ini ternyata mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Pasar Tradisi Lembah Merapi sebesar sekitar 20%. Tidak hanya berhenti pada pembukaan café, mulai bulan Mei 2022, setiap bulan sekali digelar berbagai kegiatan seni-budaya seperti pentas kelompok seni tradisional, senam pagi hingga penggunaan area Bukit Gununggono untuk

kegiatan olahraga bela diri Kyosinku Karate-do Indonesia (KKI) setiap minggu.

Strategi memadukan kegiatan wisata dan non wisata ini ternyata efektif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pasar Tradisi Lembah Merapi sekaligus sarana promosi karena secara massif diiklankan melalui berbagai platform social media yang dikerjakan oleh generasi muda Pokdarwis Tirta Biru. Besarnya partisipasi anggota Bumdes dan Pokdarwis dalam kegiatan wisata ini selaras dengan konsep *Community Based Tourism* seperti yang sudah dijalankan di Desa Nglanggeran, Gunungkidul (Manaf dkk, 2018)



Gambar 3. Pasar Tradisi Lembah Merapi (Dok. Pribadi)

Pada sisi lain, setelah dua tahun vakum akibat pandemic, banyak sarana infrastruktur yang harus diperbaiki, termasuk 37 lapak pedagang pasar tradisi. Masalahnya, kebijakan pemerintah pusat dimasa pandemic tahun 2021-2022 menyebutkan bahwa sekitar 48 % anggaran dana desa harus diperuntukkan jarring pengaman social masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penanganan Covid-19. Hal ini membuat anggaran untuk pemulihan infrastruktur wisata tidak tersedia, sehingga satu-satunya jalan adalah menggandeng pihak ketiga melalui penguatan kerjasama (*networking*).

Proses pengutan kemitraan dilakukan dengan dua tipe yaitu: 1) kerjasama yang bersifat individual dan 2) kerjasama yang

bersifat kelembagaan dengan beberapa pihak yang dianggap relevan. Sejauh ini, kerjasama individu sudah dilakukan dengan seorang barista dari Kalingkalih Kafe, Borobudur yang membantu mengoperasikan Kafe Lembah Merapi termasuk memberikan pelatihan kepada anggota Pokdarwis TirtaBiru. Pada Agustus 2022 penguatan jaringan kelembagaan mulai terjalin dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Master Plan Wisata Bukit Gununggono. Selain itu, dengan difasilitasi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferri Wawan Cahyono proses kerjasama sedang dibangun dengan Bank Jateng yang mendukung pengadaan air bersih di area Pasar Tradisi Lembah Merapi.



Gambar 4. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah di Pasar Tradisi Lembah Merapi, Gununggono

Proses penguatan jaringan ini diharapkan bisa terus berlanjut mengingat pengembangan pariwisata selalu membutuhkan sumber daya yang besar serta kerjasama dengan banyak pihak. Salah satu pihak yang sedang direncanakan untuk digandeng sebagai mitra bagi dalam pengembangan Desa Wisata Banyubiru adalah Badan Otorita Borobudur (BOB) mengingat Desa Banyubiru bisa dikatakan sebagai salah satu kawasan wisata penyangga potensial bagi Candi Borobudur. Ini tidak lepas dari tujuan pengembangan pariwisata tidak semata untuk kepentingan ekonomi, namun juga sarana ekpresi identitas budaya seperti yang terjadi di Kasepuhan

Ciptagelar, Jawa Barat (Nusanto & Widiyanto, 2021) Semua proses kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan semangat partisipatif mengingat proses pembangunan kawasan perdesaan harus ditempatkan sebagai bagian dari semangat pembangunan berkelanjutan (Sirajuddin, 2020) dan desentralisasi kebijakan ke daerah, termasuk ke tingkat desa (Andari & Ela, 2019). Inilah yang menjadi salah satu dasar berkembangnya rural tourism di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir (Situmorang dkk, 2019). Lebih lanjut, bagian utama pembangunan partisipatif adalah aspek “keterlibatan” sebagai upaya memberikan ruang bagi pemikiran serta inisiatif terhadap masyarakat selaku subyek pembangunan (Rahman, 1993; Oakley, 1991).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mendampingi Bumdes Nirmala Biru memperbaiki tata kelola kelembagaan melalui re-organisasi kepengurusan, penyusunan mekanisme kerja kelembagaan yang lebih baik serta program kerja yang jelas. Selama 6 bulan kegiatan lapangan, hal tersebut sudah dilakukan adanya restrukturisasi kepengurusan Bumdes Nirmala Biru dan Pokdarwis Tirta Biru diikuti dengan penyusunan program kerja 2022-2023 melalui Diskusi Kelompok Terarah di Kantor Desa Banyubiru.

Adanya program kerja yang jelas membuat Bumdes Nirmala Biru memiliki panduan dalam melakukan kegiatan pengembangan pariwisata melalui pembukaan unit usaha b Kafe Lembah Merapi serta penataan area Pasar Tradisi Lembah Merapi di Bukit Gununggono. Upaya ini diikuti pendampingan penguatan jejaring dengan berbagai pihak

yang diharapkan bisa berkontribusi bagi percepatan pengembangan kegiatan wisata di Desa Banyubiru secara menyeluruh. Hal ini merupakan langkah awal untuk mengubah Kawasan Wisata Bukit Gununggono menjadi daya tarik wisata harian.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dukung berbagai pihak, untuk itu Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo mengucapkan terimakasih tidak terhingga untuk Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta atas segala fasilitas yang diberikan, Pemerintah Desa Banyubiru, seluruh pengurus Bumdes Nirmala Biru dan Pokdawis Tirta Biru, pedagang Pasar Tradisi Lembah Merapi serta seluruh masyarakat Desa Banyubiru, Kabupaten Magelang atas segala keramahtamahan dan dukungan yang diberikan selama kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Afriana, F. N., & Widiyanto, N. (2021). Pandemi Covid-19 Dan Adaptasi Pelaku Pariwisata Di Dataran Tinggi Dieng. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 55-68.
- Andari, R.N., dan Ella, S. (2019). Pengembangan Model Smart Rural Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 15 (1) tahun 2019, halaman 41-58
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-

- organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability*, 10(7), 2142.
- Monografi Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Tahun 2022
- Nusanto, T.S & Widiyanto, N. (2021). Eksistensi Adat, Tanah Ulayat dan Pariwisata di Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat. *Jurnal Imiah Pariwisata, Agama dan Budaya*, Vol. 6 (1): 37-47
- Oakley, P. (1991). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. Geneva, International Labour Office.
- Rahman, M.D.A. (1993). *People's self development: Perspectives on participatory action research*. London, University Press Ltd.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2022, diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Magelang
- Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Magelang 2014-2034
- Sirajuddin, T. (2020, February). Rural development strategies in Indonesia: Managing villages to achieve sustainable development. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 447, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Widiyanto, N., & Agra, E. (2019). Tourism Development and the New Path of Migration in Sabah, Malaysia. *Borneo Research Journal*, 13, 81-97.